LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BERITA ACARA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 2
KATA PENGANTAR 5
IKHTISAR EKSEKUTIF 6
BAB I. PENDAHULUAN 8
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Gambaran Umum Organisasi 9
1.3 Tugas dan Fungsi 11
1.4 Landasan Hukum 12
1.5 Sistematika Pelaporan 13
1.6 Permasalahan Startegis 13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 15
2.1 Cascading Kinerja 15
2.2 Rencana Strategis 16
2.3 Perjanjian Kinerja 17
2.4 Rencana Kerja dan Anggaran 19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 42
3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi 42
3.1.1 Capaian Kinerja Utama Organisasi 42
3.1.2 Capaian Anggaran Kinerja Utama 45
3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran 45
3.1.4 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya 46
3.1.5 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah 47
3.1.6 Benchmarking 47
3.1.7 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja 48
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi 55
3.2.1 Pelaksanaan Kinerja Organisasi 55
3.2.2 Analisis Keterlibatan Pihak Lain 56
3.2.3 Analisis Faktor Pendukung 56
3.2.4 Analisis Faktor Penghambat 57
3.2.5 Rencana Tindak Lanjut 57
3.2.6 Penghargaan dan Apresiasi Kinerja 58
3.3 Realisasi Kinerja Anggaran 67
BAB IV. PENUTUP 76

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Panglima Sudirman Nomor 141, Kediri 64126
Telepon (0354) 686020, Pos-el: dp2kbp3a@kedirikab.go.id
Laman : https://dp2kbp3a.kedirikab.go.id

BERITA ACARA
NOMOR : 000.6.3.4/ 120 /418.22/2025
TENTANG
HASIL RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2024

Pada hari ini Senin tanggal 6 Januari 2025, bertempat di Ruang Rapat Dinas, disampaikan hasil rapat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Pimpinan Rapat

a. Kepala DP2KBP3A Kab Kediri

Peserta Rapat

1. Pejabat Struktural di Lingkup DP2KBP3A
2. Pejabat Fungsional di Lingkup DP2KBP3A
3. Pejabat Pelaksana di Lingkup DP2KBP3A

Hasil Rapat

1. Data yang disampaikan dalam Laporan Kinerja tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disampaikan;
2. Data yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah direview secara berjenjang oleh masing-masing bidang/seksi dan merupakan perbaikan atas saran dan masukan (sebagaimana terlampir);

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyetujui Hasil Rapat :

1	Sekretaris Dinas **Nono Soekardi, SH,MM**	1. .....
2	Kabid Keluarga Berencana **Dra. S. Dewi Pregiwasari,MM**	2. .....
3	Kabid Pengendalian Penduduk **Drs. Bambang Hasto B**	3. .....
4	Kabid Keluarga Sejahtera **Riffa Hanidah, S.SiT., M.Kes**	4. .....
5	Analis Kebijakan Ahli Muda **Intan Candra Dewi, SKM, M.Kes**	5. .....

Mengetahui,
Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri

Dr.dr. Nurwulan Andadari, MMRS
Pembina Tingkat I
NIP. 19681029 200312 2 002

Lampiran Berita Acara
Nomor : **000.6.3.4**/120/418.22/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

Matrikulasi Perbaikan Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DP2KBP3A Kabupaten Kediri

Pengusul	Usulan Perbaikan	Tindak Lanjut Perbaikan
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Memerbaiki Data yang disampaikan dalam Sub-bab 3.1.7.a	Data sudah diperbaiki

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir tahun anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Kediri dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024. Dengan melaksanakan pelaporan, pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak mengenai kinerja DP2KBP3A Kabupaten Kediri.

Masukan dan saran dari semua pihak untuk meningkatkan kinerja DP2KBP3A Kabupaten Kediri di masa mendatang masih diharapkan.

Kediri, Januari 2025

Kepala DP2KBP3A
Kabupaten Kediri



Dr. dr. NURWULAN ANDADARI MMRS.
Pembina Tk. I
NIP. 19681029 200312 2 002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DP2KBP3A Kabupaten Kediri Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DP2KBP3A Tahun 2021 – 2026.

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DP2KBP3A menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021-2026 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori Kinerja
Meningkatnya upaya pengendalian penduduk	Crude Birth Rate (CBR)	11,01	9,50	113,71	Sangat Baik
Meningkatnya kesertaan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,31	93,25	99,93	Baik

Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pagu Anggaran (Setelah PAK)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
33.080.091.735	31.550.787.218	95,38

Data capaian kinerja dan keuangan diatas diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pada tahun ke tahun berikutnya. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Goverment) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government).

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tolok ukur bagi Pemerintah Daerah dalam

mengukur Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada *input* (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Nama Unit Organisasi : DP2KBP3A Kabupaten Kediri

1.2.2 Alamat Organisasi : Jalan Panglima Sudirman No 141 Kediri

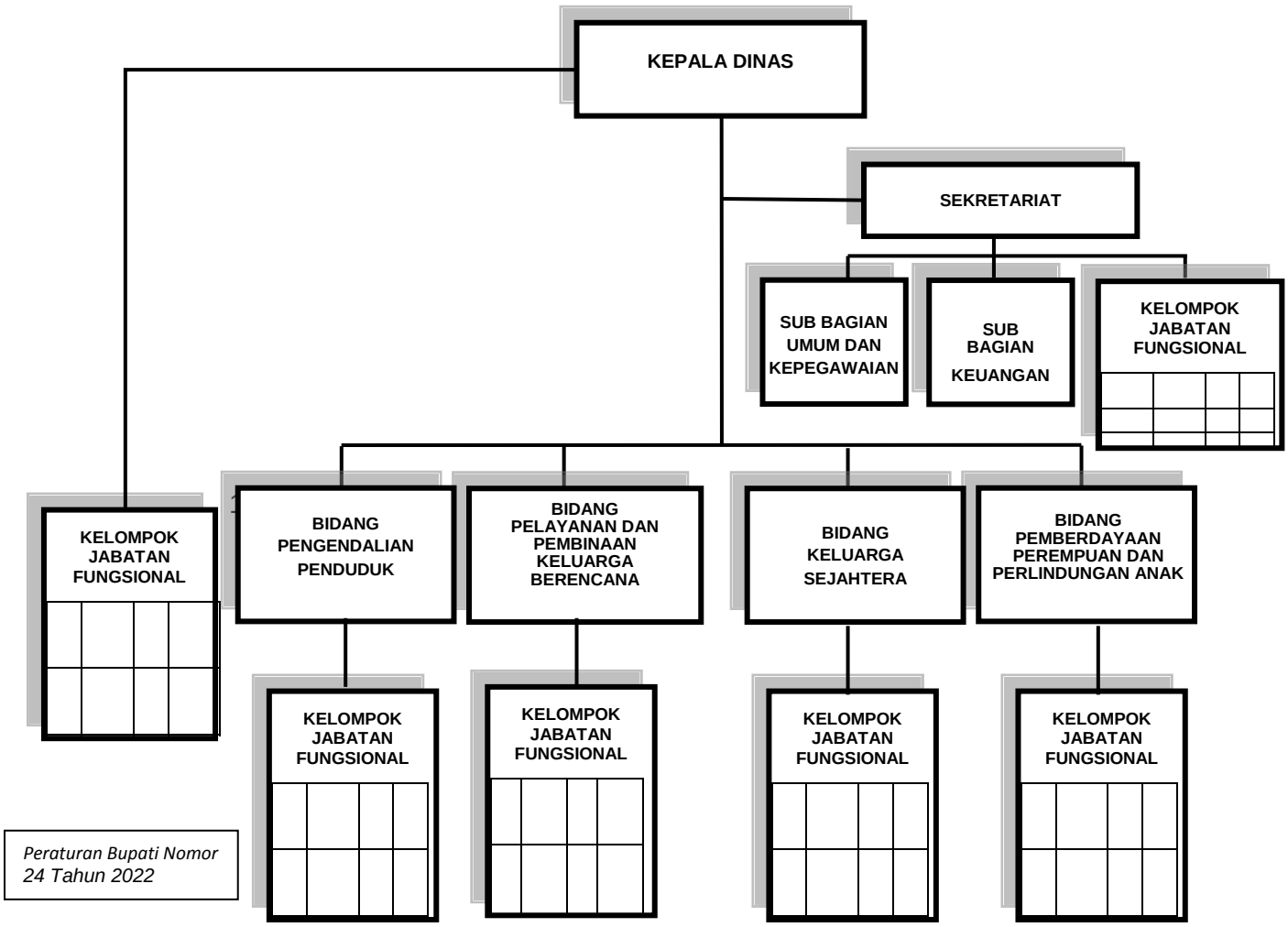
1.2.3 Struktur Organisasi :

1. Kepala Dinas 1 (satu) orang
2. Sekretaris Dinas 1 (satu) orang
3. Dibawah Sekretaris ada 3 (tiga) orang, terdiri dari :
   - Kepala sub bagian penyusunan program
   - Kepala sub bagian keuangan
   - Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana 1 (satu) orang, yang dibawahnya ada 2 (dua) orang kepala seksi, yang terdiri dari :
   - Kepala Seksi Kesertaan ber-KB dan Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi
   - Kepala Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
5. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera 1 (satu) orang, yang dibawahnya ada 2 (dua) orang kepala sub bidang, yang terdiri dari :
   - Kepala Seksi Ketahanan Keluarga
   - Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Penggerakan Lini Lapangan
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk 1 (satu) orang, yang dibawahnya ada 2 (dua) orang kepala sub bidang, yang terdiri dari :
   - Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk
   - Kepala Seksi Informasi Kependudukan dan Keluarga

7. Bidang Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak (PP dan PPA) 1 (satu) orang, yang dibawahnya kepala seksi, yang terdiri dari :
   - Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
   - Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah sebagai berikut :

Tabel I.1
Struktur Organisasi DP2KBP3A



1.3 Tugas dan Fungsi

1.3.1 Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani

1.3.2 Misi

Misi 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius

1.3.3 Tugas

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak

1.3.4 Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,
3. Pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,

6. Pembinaan penyelenggaraan dibidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
7. Pembinaan UPTD;
8. Pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,
9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati, dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4 Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri
7. Keputusan Bupati Kediri Nomor Tahun 188.45/113/418.08/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kediri;

8. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Kediri Nomor 188/3682/418.22/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai penjelasan umum tentang profil, tugas, fungsi dan struktur organisasi serta mandat dan peran dari DP2KBP3A serta Permasalahan Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai hubungan RPJMD dan Renstra, *Cascading* dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data Lampiran yang diperlukan.

1.6 Permasalahan Startegis

Isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antar lain :

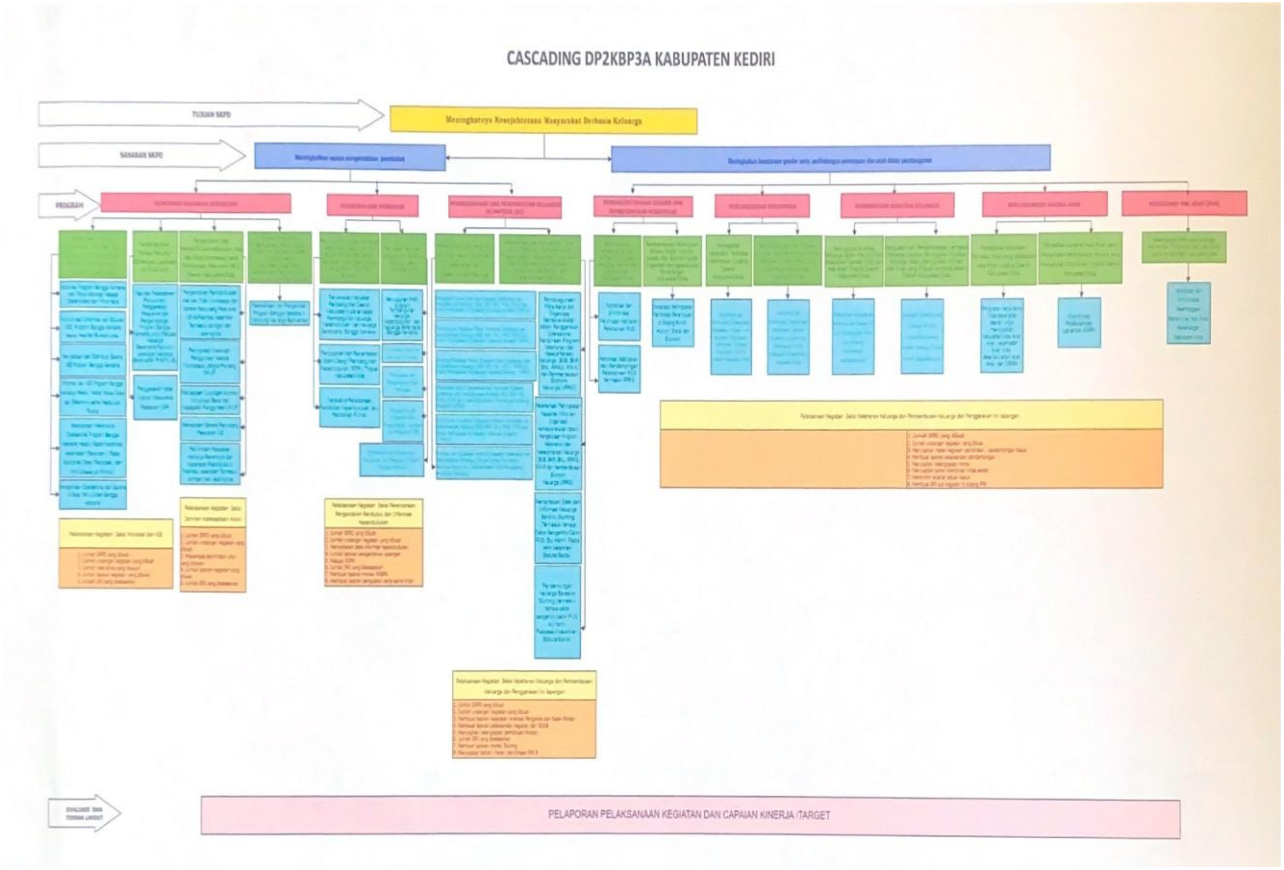
a. Masih minimnya SDM tentang pemahaman peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai aparatur yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
b. Masih banyaknya kasus tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang belum terlaporkan

c. Masih kurangnya peranan dan koordinasi organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan Perempuan dan Anak
d. Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG)
e. Perlunya ketahanan dan pembangunan keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk percepatan penurunan stunting
f. Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan
g. Perlunya peningkatan peluang bagi perempuan dan kelompok rentan dalam pendayagunaan di Kabupaten Kediri

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

1.1 Cascading Kinerja

Cascading kinerja digunakan untuk mengetahui dukungan kinerja dari Perangkat Daerah menuju kinerja Pemerintah Daerah. Peran dan dukungan ini digunakan untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Cascading dari DP2KBP3A sebagai berikut :



Gambar 2.2.1.a Cascading Kinerja DP2KBP3A

Dari Cascading diatas ditampilkan bahwa DP2KBP3A mendapatkan mandat dari Bupati Kediri untuk mengawal misi I Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius dengan Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga

1.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis OPD disusun setelah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakdisebutkan dalam mendukung pencapaian Misi ke 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius ditetapkan tujuan DP2KBP3A yakni Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat berbasis keluarga dengan sasaran :

a. Meningkatnya Upaya Pengendalian Penduduk
b. Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan

Dijelaskan dalam matriks perencanaan kinerja strategis DP2KBP3A sebagai berikut :

Tabel 2.2.a Tujuan dan Sasaran Kinerja Startegis DP2KBP3A

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga		Persentase Keluarga Sejahtera	70,61	71,11	71,61	72,11	72,61	73,11
	Meningkatnya Upaya Pendalian Penduduk	Crude Birth Rate (CBR)	16,8	15,59	15,39	15,19	14,99	14,79
	Meningkatnya Kesetaraan Gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,13	93,19	93,25	93,31	93,37	93,43

Metode Pengukuran dan perhitungan indikator dijelaskan dalam matriks berikut :

Tabel 2.2.b Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Strategis DP2KBP3A

Indikator	Formula	Sumber Data (Perangkat Verifikasi)
Persentase Keluarga Sejahtera	= Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III Plus / Jumlah Keluarga	Data Hasil Survei Keluarga Sejahtera dalam Aplikasi
Crude Birth Rate	= Jumlah Kelahiran per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama (Jumlah Kelahiran/Jumlah Penduduk) x 1000	Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kediri Tahun 2024 Data Dinkes
IPG (Indeks Pembangunan Gender)	= IPM Perempuan / IPM Laki-laki	Kabupaten Kediri dalam Angka

1.3 Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2024, Kepala DP2KBP3A telah menyepakati Sasaran, Indikator dan Target kinerja dengan Bupati Kediri. Terdapat beberapa penyesuaian dalam penyusunan Perjanjian Kinerja ini, terutama sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari Kementerian PANRB untuk mengganti target apabila realisasi tahun sebelumnya telah melampaui target tahun berikutnya dalam Renstra menjadi lebih realistis yakni dengan meningkatkan (lebih tinggi) atau mempertahankan (sama) dengan realisasi tahun sebelumnya. Selain hal tersebut, terdapat perubahan Perjanjian Kinerja sebagai penyelarasan ulang atas Perubahan Anggaran Kerja (PAK), Pergantian atau mutasi Pejabat, Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, serta hal-hal lain yang diatur dalam PermenPANRB 53 Tahun 2014. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan DP2KBP3A adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.a Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya upaya pengendalian Penduduk	Crude Birth Rate (CBR)	11,01
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,31

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka ditetapkanlah Program dan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.3.b Program dan Anggaran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.213.972.755
2	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 29.508.000
3	Perlindungan Perempuan	Rp. 8.500.000
4	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 145.492.000
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 115.999.600
6	Perlindungan Khusus Anak	Rp. 261.500.000
7	Pengendalian Penduduk	Rp. 1.675.897.450
8	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 15.158.129.950
9	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 9.200.914.000
	Jumlah Anggaran	**Rp. 28.809.913.755**

1.4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2024, ditetapkanlah RKA setelah PAK Tahun 2024 sebagai berikut;

Tabel 2.4.a Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
URAIAN	**Indikator Sasaran**	**Target**				
1. Meningkatnya upaya pengendalian penduduk	***1. Crude Brith Rate (CBR)***	***11,01***	***PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK***	***Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga***	***100%***	***1.675.897.450***
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Jenis implementasi sinkronsasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk**	**2 jenis**	**67.266.950**
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah dokumen hasil Penyera sian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	1 dokumen	5.684.000
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	9.966.000
			Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah dokumen Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 dokumen	51.616.950
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen evaluasi Program KKBPK**	**1 dokumen**	**1.608.630.500**
			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	1.945.000
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	1 dokumen	18.425.000
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	1 laporan	1.365.180.000
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	111.878.500
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 dokumen	111.202.000
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Unmet need**	***10,29%***	***15.158.129.950***
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jenis kegiatan advokasi dan KIE yang mendukung program KKBPK**	**5 jenis**	**2.321.263.075**
			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 organisasi	222.937.500

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
URAIAN	Indikator Sasaran	Target				
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pro gram Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependuduk an dan Keluraga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	38.447.500
			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE Pro gram Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependuduk an dan Keluraga Berencana)	1 unit	5.000.000
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluraga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	231.758.000
			Pelaksanaan mekanisme operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi Kecamatam (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Loka Karya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional Pro gram Bangga Kencana (Pembangunan Keluar ga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui rapat koordinasi Kecamatam (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Loka Karya (Minilok)	1 laporan	390.000.000
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluraga Berencana)	1 laporan	1.433.120.000
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Persentase tenaga penyuluh KB yang mendapatkan pembinaan**	**90%**	***6.243.305.500***
			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengem bangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependu dukan dan Keluraga Berencana) untuk Petugas Keluarga Beren cana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 laporan	141.905.500
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3275 orang	6.101.400.000
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Jenis pelayanan dan pendistribusian alkon**	4 jenis	***5.097.811.375***

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
URAIAN	Indikator Sasaran	Target				
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 laporan	59.600.000
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang g mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6750 akseptor	4.826.076.375
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 laporan	105.000.000
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	1 unit	135.000
			Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jejaring dan jaringannya	Jumlah laporan Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jejaring dan jaringannya	1 laporan	107.000.000
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakat an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Jumlah kampung KB yang di bina**	**82 kampung KB**	***1.495.750.000***
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluraga Berencana) di Kampung KB	82 kampung KB	1.495.750.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	***Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)***	**BKB 32,98%; BKR 28,26%; BKL 36,32%**	**9.506.714.000**
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Jumlah kelompok sasaran pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	6 sasaran	964.618.900
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejah teraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 unit	309.540.000
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	15.755.800

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
URAIAN	Indikator Sasaran	Target				
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelak sana / Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	906 orang	7.164.100
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan)	100 kelompok	250.000.000
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiat an Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	1 laporan	6.474.300
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 laporan	375.684.700
				Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun	***16,65%***	
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyara katan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Jumlah pembina dan kelompok PIK yang dibina**	**90 kelompok**	**8.542.095.100**
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	293.100.000
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	150 organisasi	5.195.100

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
URAIAN	Indikator Sasaran	Target				
			Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan pemantauan data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	3.780.000.000
			Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon penganting/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah keluarga beresiko stunting (temasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapatkan pendampingan	1 laporan	4.463.800.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	***Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah***	***80%***	***5.852.350.735***
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jenis dokumen perangkat daerah yang diselesaikan**	**3 jenis**	**600.000**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	150.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Domunen RKA SKPD	1 dokumen	150.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Domunen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	150.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	150.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	12 bulan	**4.628.920.280**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22 orang	3.638.377.980
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	759.000.000
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penata usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	214.920.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan hasil Koordi nasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	8.139.700

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
URAIAN	Indikator Sasaran	Target				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	8.482.600
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**12 laporan**	-
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian**	1 dokumen	**316.145.000**
			Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 unit	150.000
			Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	1 dokumen	30.545.000
			Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	150.000
			Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	22 orang	285.300.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	**12 laporan**	**191.615.425**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	6.824.700
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket realatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	5.000.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	9.650.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	1 dokumen	3.360.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	166.630.725
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	150.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 laporan**	**54.089.380**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	150.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	36.600.000

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
URAIAN	Indikator Sasaran	Target				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	17.339.380
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara**	1 laporan	**136.375.650**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	111 unit	61.000.000
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 paket	393.900
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	14.150.800
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2 gedung	60.830.950
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 paket**	**524.605.000**
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	524.605.000
2. Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	**1. IPG (Indeks Pembangunan Gender)**	**93,31**	***PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN***	***Persentase OPD yang responsif gender***	***100%***	***29.508.000***
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah OPD yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan**	63 opd	**29.000.200**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PUG kewenangan kabupaten	1 dokumen	4.000.200
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk perencanaan pembangunan resposif gender (PPRG) kewenangan kabupaten	63 opd	25.000.000
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekono mi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan**	**1 dokumen**	**507.800**
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten	1 dokumen	507.800
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	***Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A***	**100%**	***8.500.000***
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen kebijakan perlindungan perempuan**	**1 dok**	**500.000**

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
URAIAN	Indikator Sasaran	Target				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten	1 dok	500.000
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Keke rasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan**	**12 bulan**	**8.000.000**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan dan korban kekerasan kewenangan kabupaten	12 bulan	8.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	***Peresentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa***	***85%***	***471.492.000***
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan event	3 event	**471.000.000**
			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten yang tersedia	3 event	471.000.000
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen rekomendasi jejaring layanan perlindungan perempuan**	**1 dokomen**	**492.000**
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten	1 dokomen	492.000
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	***Persentase pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh P2TP2A***	**87%**	***115.999.600***
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	***Jumlah dokumen pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintahdan Dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota***	**1 dokumen**	*115.999.600*
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	***Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota***	**1 dokumen**	*115.999.600*

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
URAIAN	Indikator Sasaran	Target				
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	***Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A***	**82%**	***261.500.000***
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen kebijakan perlindungan anak**	1 dokumen	**126.500.000**
			Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	1 kegiatan	126.500.000
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khu sus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak anak**	**1 dokumen**	**135.000.000**
			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	100 orang	135.000.000
			JUMLAH			**33.080.091.735**

Tabel 2.4.b Rencana Aksi Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Meningkatnya upaya pengendalian penduduk	***Crude Brith Rate (CBR)***	-	-	-	***11,01***

No.	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	**PROGRAM PENGENDALI AN PENDUDUK**	Persentase desa/ kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	100%	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jenis implemen tasi sinkronsasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	2 jenis	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terha dap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah dokumen hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terha dap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	1 doku men	Rapat Koordinasi Pemilihan Pengurus Koalisi Kependudukan		√		

No.	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
							Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyu sunan dan Pemanfaat an Grand Design Pemba ngunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rapat koordinasi Pemanfaatan Grand Design Kependudukan	√			
										Rapat Koordinasi Penyusunan Perda GDPK		√		
										Pencetakan Dokumen GDPK		√		
							Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah dokumen Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidik an Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 dokumen	Penyusunan Penunjukan SK Pembentukan SSK	√			
										Rapat koordinasi pembentukan SSK		√		
										Seminar Sekolah Siaga Kependudukan			√	
										Lomba Sekolah Siaga Kependudukan			√	√
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi Program KKBPK	1 dokumen	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	Rapat Koordinasi Penyusunan Profil Kependudukan	√			
										Pengumpulan Data	√			
										Penyusunan dokumen profil kependudukan		√		
							Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	1 dokumen	Rapat Koordinasi evaluasi aplikasi Data Keluarga	√			
										Input Data Keluarga pada aplikasi	√	√	√	√
										Rapat evaluasi input data keluarga sejahtera		√		√
							Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	1 laporan	Pelaksanaan KIE Bangga Kencana oleh kader di desa	√	√	√	√
										Perekaman laporan data bangga kencana	√	√	√	√
										Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data KRS		√	√	
										Evaluasi Pencatatan dan pelaporan Bangga Kencana	√	√	√	√

No.	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
							Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengola han dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	Pengumpulan dan entry Pengendalian Data lapangan (Dalap)	√	√	√	√
										Rapat koordinasi evalu asi Capaian Program Bangga Kencana	√		√	
										Pembayaran Rekening Wifi di Balai Penyuluhan KB	√	√	√	√
							Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 laporan	Punyusunan juknis BOKB	√			
										Rapat Koordinasi dan Evaluasi BOKB	√		√	
										Pembinaan Perekaman dan Pelaporan(R/R) Program KB bagi Petugas R/R klinik KB di Kabupaten			√	
2	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Unmet need	10,20 %	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jenis kegiatan advokasi dan KIE yang mendukung program KKBPK	5 jenis	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6 organisasi	Rapat Koordinasi dengan mitra terkait penggerakan dan pelayanan KB	√			
										Pelayanan Safari KB	√	√	√	√
										Pembinaan faskes	√	√	√	
							Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen Komuni kasi, Informasi dan Eduka si (KIE) Pro gram Bangga Kencana (Pembangunan Keluar ga, Kependudukan dan Keluraga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	KIE program bangga kencana menggunakan mobil unit penerangan KB	√	√	√	√

No.	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
							Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah unit sarana penyediaan dan pendis tribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudu kan dan Keluraga Berencana)	1 unit	Pendistribusian Media KIE bangga kencana ke balai KB		√		
							Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen Promosi dan KIE Pro gram Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudu kan dan Keluraga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 doku men	Promosi dan KIE bangga kencana melalui media cetak	√	√	√	√
										Promosi dan KIE bangga kencana melalui media radio	√	√	√	√
										Promosi dan KIE bangga kencana melalui media luar ruang		√	√	√
										Promosi dan KIE bangga kencana melalui media sosial	√	√	√	√
							Pelaksanaan mekanisme operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi Kecamatam (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Loka Karya (Minilok)	Jumlah laporan meka nisme operasional Program Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kepen dudukan dan Keluarga Berencana) melalui rapat koordinasi Kecamatam (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Loka Karya (Minilok)	1 lapo ran	Minilokakarya stunting di kecamatan	√	√	√	√

No.	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
							Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah laporan hasil pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluraga Berencana)	1 laporan	Operasional penyuluhan di Balai KB	√	√	√	√
										Operasional pengolahan data	√	√	√	√
										Langganan daya di Balai Penyuluhan	√	√	√	√
										Pramusaji	√	√	√	√
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh KB yang mendapatkan pembinaan	90%	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan hasil Penguatan Pelaksanan Penyuluhan, Penggera kan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pem bangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluraga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 laporan	Pembinaan PKB, PPKBD dan Sub PPKBD, Temu Kader IMP	√	√		
							Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3275 orang	BOP PPKBD dan Sub PPKBD	√	√	√	√

No.	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan dan pendistribusian alkon	4 Jenis	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontra sepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	89 lapo ran	Pendistribusian obat dan alat kontrasepsi ke faskes KB	√	√	√	√
										Pengambilan obat dan alat kontrasepsi ke Propinsi	√	√	√	√
							Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6750 oran g	Safari KB di semua faskes	√	√	√	√
										Safari KB menggunakan muyan	√	√	√	√
										Pelayanan MOW massal	√	√	√	√
							Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 lapo ran	Pelayanan IUD Post SC dan Komplikasi KB MKJP	√	√	√	√
							Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	1 unit	Pembelian obat dan BMHP	√	√	√	√
										Pelaksanaan pengawasan Konstruksi		√	√	
										Rehab balai Penyuluhan KB		√	√	
							Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jejaring dan jaringannya	Jumlah laporan Pembi naan pelayanan Keluarga Berencana dan Kese hatan Repro duksi di fasilitas kesehatan termasuk jejaring dan jaringannya	1 lapo ran	Pembinaan, rapat faskes dan membangun kapasitas faskes	√			

No.	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kampung KB yang di bina	82 kampung KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluraga Berencana) di Kampung KB	82 kampung KB	Pertemuan Pokja Kampung KB	√	√	√	√
										Operasional Ketahanan Keluarga	√	√	√	√
										Pembekalan Kampung KB	√			
										Perlombaan Kampung KB		√		
3	**PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	BKB 32,98 %; BKR 28,26 %; BKL 36,32 %	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok sasaran pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	6 sasaran	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kese jahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25 unit	Pengadaan BKB Kit Stunting			√	
							Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	Pembinaan kepada pengelola kelompok Bina Keluarga (Kades, Bidan dan TPKK Desa) di Kabupaten	√	√	√	

No.	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
							Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pember dayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi / Pelatihan Teknis Pelak sana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	906 orang	Pembinaan pada kader kelompok kegiatan KB di kabupaten	√	√		
							Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	100 kelompok	Penyediaan anggaran TPK dan TPPS	√	√	√	√
							Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejah teraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	1 laporan	Resepsi Harganas tingkat Kabupaten		√		
										Perjalanan dinas peringatan Harganas Nasional		√		
										Perjalanan dinas peringatan Harganas Propinsi		√		

No.	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
							Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Beren cana, Kelanjutusia an serta Pengelola an Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejah teraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjut usiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 lapo ran	Rapat koordinasi TPPS tingkat kabupaten		√	√	
										Rapat TTPS tingkat kecamatan		√		
										Sosialisasi sekolah orang tua hebat tingkat kabupaten	√		√	
										Sosialisasi Stunting	√			
										Sosialisasi Gemar makan ikan	√			
		Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun	16,65 %	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangun an Keluarga Melalui Pembinaan Ketaha nan dan Kesejahte raan Keluarga	Jumlah pembina dan kelompok PIK yang dibina	90 kelo mpo k	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Penda yagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kema syarakatan dalam Peng gerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kese jahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdaya an Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	1 lapo ran	Lomba pemilihan duta Genre		√		
										Lomba Inovasi Kelomok PIK Remaja dan Saka Kencana	√			
										Genre go to School		√		
										Genre live musik		√		
										Sosialisasi pencegahan stunting dari hulu pada kelompok PIK Remaja dan Saka Kencana		√		
										Pengiriman Duta Genre ke propinsi		√		

No.	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
							Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasya rakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasya rakatan dalam Pengelo laan Program Ketaha nan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100 orang	Pembinaan pada pembina PIK Remaja	√		√	
							Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon penganting/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah kegiatan operasional yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)	3780 orang	Pendampingan Calon Pengantin, Ibu Hamil, Bufas dan Baduta di Desa	√	√	√	√
							Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah kegiatan pendamping yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)	3780 orang	Operasional Pendampingan Calon Pengantin, Ibu Hamil, Bufas dan Baduta di Desa	√	√	√	√

No.	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
SASARAN STRATEGIS							**INDIKATOR KINERJA**				**TARGET**			
											TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan							***IPG (Indeks Pembangunan Gender)***							***93,31***
1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang responsif gender	100%	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	63 opd	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PUG kewenangan kabupaten	1 dokumen	Perjalanan Dinas ke DP3AK Prov Jatim untuk Koordinasi APE	√			
										Studi Tiru ke Kabupaten Trenggalek terkait Sekoper dan Pelaksanaan APE	√			
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendamping an pelaksa naan PUG termasuk perencanaan pemba ngunan resposif gender (PPRG) kewenangan kabupaten	63 opd	Sosialisasi Evaluasi Pengisian APE tahun 2023	√			
										Pengambilan Piala dan Piagam APE ke Jakarta	√			
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	1 dokumen	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten	1 dokumen	Pembelian ATK	√			

No.	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
2	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A	100%	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan perempuan	1 dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkro nisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten	1 dokumen	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	√			
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Me merlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	12 bulan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan dan korban kekerasan kewenangan kabupaten	12 bulan	Fasilitasi dan pendampingan korban kekerasan pada perempuan	√	√	√	√
3	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Peresentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa	87%	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan event	3 event	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten yang tersedia	1 dokumen	Kartini Fiesta		√		
										Peringatan Hari Ibu				√

No.	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi jejaring layanan perlindungan perempuan	1 dokumen	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten	1 dokomen	Pembelian ATK	√			
4	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh P2TP2A	87%	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Sosialisasi dan Advokasi Pemehnuhan Hak Anak	√	√	√	√
5	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	87%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan anak	1 dokumen	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA Terpadu	1 kegiatan	Sosialisasi dan inisiasi pembentukan satgas PPA	√	√	√	√
										Penguatan kapasitas SDM PPA	√	√	√	√

No.	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator	Target		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak anak	1 dokumen	Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	100 orang	Fasilitasi dan Pendampingan AMPK (Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus)	✓	✓	✓	✓

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi disampaikan dengan Capaian Kinerja Utama, Capaian Anggaran, Efisiensi Sumber Daya, Perbandingan Realisasi Tahun Sebelumnya, Perbandingan Target RPJMD, dan *(Benchmarking)*;

3.1.1 Capaian Kinerja Utama Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Kinerja pada level kinerja utama. Capaian Kinerja utama tersebut mengambil pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 untuk disampaikan pencapaiannya. Sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kinerja yakni Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung-jawab kami. Dalam hal ini, penyampaian capaian kinerja organisasi disampaikan sebagai berikut;

1. Persentase Capaian Positif : Realisasi/Target x 100%
2. Persentase Capaian Negatif :Target-(Realisasi-Target)/Target x 100%

Dalam menentukan Kategori Kinerja diukur dengan skala sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Baik apabila Capaian sama atau diatas (≥) 100%
2. Kategori Baik apabila Capaian lebih dari 80% dan kurang dari 100%
3. Kategori Cukup Baik apabila Capaian lebih dari 60% dan kurang dari 80%
4. Kategori Kurang Baik apabila Capaian kurang dari 60%.

Adapun capaian kinerja organisasi disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.a Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Kategori Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya upaya pengendalian Penduduk	Crude Birth Rate (CBR)	11,01%	9,50%	113,71	Sangat Baik
Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,31	93,25	99,93	Baik

Dari data diatas, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja utama masuk dalam kategori kinerja sangat baik dan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja masuk dalam kategori kinerja baik

Keandalan Perhitungan dan Analisa Data Kinerja akan disampaikan sebagai berikut:

Indikator	Formula	Operasionalisasi	Hasil Perhitungan	Dokumen Dasar Perhitungan
Crude Birth Rate (CBR)	Banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama (Jumlah kelahiran / Jumlah penduduk) X 1000	$\frac{\text{Jumlah kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	$\frac{16.070}{1.691.976} \times 1000$ = 9,50	Data Dinkes Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kediri Tahun 2024
IPG (Indeks Pembangunan Gender)	IPM perempuan / IPM laki-laki IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar : (i) umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge) dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living)	$\frac{\text{IPM perempuan}}{\text{IPM laki} - \text{laki}}$	$\frac{72,65}{77,91} \times 100\%$ = 93,25	Kabupaten Kediri dalam Angka

Data mentah/dasar Perhitungan adalah sebagai berikut;

1. Indikator 1 (CBR = Crude Birth Rate)

   Data dasar perhitungan

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN	JUMLAH PENDUDUK	ANGKA KELAHIRAN KASAR (CBR)
1	SEMEN	535	55.042	9,72
2	MOJO	892	82.964	10,75
3	KRAS	608	65.129	9,34
4	NGADILUWIH	825	81.888	10,07
5	KANDAT	610	64.227	9,50
6	WATES	849	93.256	9,10
7	NGANCAR	538	53.267	10,10
8	PUNCU	566	67.132	8,43
9	PLOSOKLATEN	806	77.670	10,38

10	GURAH	793	85.358	9,29
11	PAGU	388	41.536	9,34
12	GAMPENGREJO	304	34.150	8,90
13	GROGOL	427	49.704	8,59
14	PAPAR	502	55.189	9,10
15	PURWOASRI	522	62.047	8,41
16	PLEMAHAN	520	63.489	8,19
17	PARE	1.179	110.513	10,67
18	KEPUNG	840	88.701	9,47
19	KANDANGAN	470	53.359	8,81
20	TAROKAN	637	65.701	9,70
21	KUNJANG	308	38.695	7,96
22	BANYAKAN	577	60.156	9,59
23	RINGINREJO	536	59.726	8,97
24	KAYEN KIDUL	441	49.094	8,98
25	NGASEM	745	63.743	11,69
26	BADAS	652	70.240	9,28
	KABUPATEN	**16.070**	**1.691.976**	**9,50**

2. Indikator 2 (IPG = Indeks Pembangunan Gender)

   Indeks Pembangunan Gender menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Indeks Pembangunan Gender ini dipengaruhi oleh Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata – rata Lama Sekolah dan Pengeluaran PerKapita. Data realisasi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kediri tahun 2024 sebesar 93,25 atau telah tercapai sebesar 99,93% dari target.

3.1.2 Capaian Anggaran Kinerja Utama

Capaian Anggaran Organisasi disampaikan untuk mengetahui besaran anggaran yang digunakan dalam pencapaian kinerja tersebut. Capaian anggaran dihitung menggunakan cara realisasi dibagi dengan pagu dikalikan 100%. Adapun hasil capaian anggaran Organisasi adalah sebagai berikut;

Tabel 3.1.2.a Capaian Anggaran DP2KBP3A Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran			Zona Penyerapan Anggaran
		Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya upaya pengendalian Penduduk	Crude Birth Rate (CBR)	26.340.741.400	25.509.622.514	96,84	Zona Hijau
Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	886.999.600	533.947.224	60,19	Zona Kuning

Dari data diatas, sebanyak 1 (satu) indikator dalam zona hijau penyerapan anggaran dan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja masuk dalam zona kuning.

Penyampaian zona penerapan anggaran tersebut dijadikan rujukan dalam menghubungkan hubungan antara ketercapaian kinerja dan capaian anggaran. Secara teknis hubungan ketercapaian kinerja dan anggaran tersebut disampaikan dalam bagian berikutnya yakni perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya.

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Untuk melihat efisiensi anggaran, maka digunakanlah rumus capaian kinerja dikurangi dengan capaian anggaran. Apabila hasilnya menunjukkan angka lebih dari 0 maka dapat dikatakan efisien, namun apabila di bawah 0 maka dapat dikatakan tidak efisien. Namun demikian, capaian kinerja haruslah sama atau diatas 100%, karena dengan demikian capaiannya akan sudah efektif. Apabila capaian kinerja belum efektif (belum 100%), maka dapat disebutkan penggunaan sumber daya menjadi tidak efisien.

Tabel 3.1.3.a Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Kategori Kinerja
		Capaian Kinerja*	Capaian Anggaran**	Efisiensi ****	
Meningkatnya upaya pengendalian Penduduk	Crude Birth Rate (CBR)	113,71	96,84	16,87	Efisien
Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	99,93	60,19	39,74	Efisien

*) Data diambil dari kolom capaian kinerja Tabel 3.1.a
**) Data diambil dari kolom capaian anggaran Tabel 3.2.a
***) Data dihitung dengan capaian kinerja dikurangi capaian anggaran dengan syarat capaian kinerja harus sama atau diatas 100%.

Dari data diatas, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja masuk dalam kategori kinerja Efisien .Data efisiensi kinerja ini akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kinerja tahun berikutnya, dalam upayanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Untuk perhitungan Program dan Kegiatan tidak Masuk dalam perhitungan sub-bab ini, karena akan dibahas pada sub-bab 3.1.7.

3.1.4 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Dalam melihat konsistensi peningkatan dari tahun ke tahun, ditampilkan realisasi kinerja dari dua tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun digunakan untuk mengetahui fluktuasi peningkatan apakah meningkat secara konsisten, bertahan, fluktuatif atau menurun secara konsisten. Dari perbandingan realisasi tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama, terutama perbaikan-perbaikan kinerja.

Tabel 3.1.4.a Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja			Keterangan
		2022	2023	2024	
Meningkatnya upaya pengendalian Penduduk	Crude Birth Rate (CBR)	10,45	11,01	9,49	Bertahan

Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	92,85	93,25	93,25 (data tahun 2023 karena data belum keluar)	Konsisten Meningkat

Dari data diatas, sebanyak 1 indikator kinerja dengan keterangan bertahan dan sebanyak 1 indikator kinerja dengan keterangan konsisten menigkat.

3.1.5 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Dalam mengupayakan pencapaian target jangka menengah Perangkat Daerah, maka perlu diperbandingkan realisasi tahun ini dengan target Renstra/RPJMD untuk mengetahui rentang jarak antara realisasi tahun ini dengan target jangka menengah. Penyusunan ini erat kaitannya dengan tindak lanjut dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan untuk mengupayakan tercapainya target jangka menengah.

Tabel 3.1.5.a Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	**Indikator**	**Realisasi Kinerja**			**Keterangan**
		Realisasi	**Target RPJMD**	**Capaian**	
Meningkatnya upaya pengendalian Penduduk	Crude Birth Rate (CBR)	9,50	15,19	137,45	
Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,25	93,31	99,93	

Dari data diatas, terdapat 1 (satu) indikator yang melebihi target jangka menengah dan terdapat 1 (satu) indikator yang masih dibawah target jangka menengah. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penetapan target perencanaan tahun berikutnya.

3.1.6 *Benchmarking*

Dalam mengupayakan pencapaian target jangka Nasional dan Provinsi, maka perlu diperbandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lain. Penyusunan ini erat kaitannya dengan tindak lanjut dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan untuk mengupayakan tercapainya target.

Tabel 3.1.6.a Data *Benchmarking* Realisasi Kinerja

Indikator	Nasional	Provinsi	Kab/Kota Lain	Keterangan
Crude Birth Rate (CBR)	17,07 (2022)	14,62 (2022)	15,39 (2022)	Kabupaten Jombang
IPG (Indeks Pembangunan Gender)	91,85 (2023)	92,15 (2023)	90,65 (2023)	Kabupaten Jombang

Dari hasil data diatas, didapati hal sebagai berikut;

Terdapat 2 (dua) indikator yang lebih tinggi dari capaian nasional dan capaian provinsi;

3.1.7 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

Untuk mengetahui Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja diperoleh dengan cara sebagai berikut;

1. Kategori Kinerja ditentukan sesuai dengan perhitungan pada sub-bab sebelumnya;
2. Dukungan Terhadap Kinerja ditentukan dengan kategori dukungan sebagai berikut;
    a. Kategori Sangat Mendukung apabila Capaian sama atau diatas (≥) 100%
    b. Kategori Mendukung apabila Capaian lebih dari 80% dan kurang dari 100%
    c. Kategori Cukup Mendukung apabila Capaian lebih dari 60% dan kurang dari 80%
    d. Kategori Kurang Mendukung apabila Capaian kurang dari 60%.

Target 3.1.7.a Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kgagalan Kinerja

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender	100%	100%	100%	Sangat Mendukung	
1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	63 opd	63 OPD	100%	Sangat Mendukung	
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Sangat Mendukung	
Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A	100%	100%	100%	Sangat Mendukung	
1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perem puan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan perempuan	1 dok	1 dok	100%	Sangat Mendukung	

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	12 bulan	12 bulan	100%	Sangat Mendukung	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa	87%	87%	100%	Sangat Mendukung	Belum semua desa membentuk forum anak sebagai wadah pemenuhan hak anak
1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan event	3 event	3 event	100%	Sangat Mendukung	
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi jejaring layanan perlindungan perempuan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Sangat Mendukung	

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak yag dilakukan oleh P2TP2A	87%	100%	114,94%	Sangat Mendukung	
1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Sangat Mendukung	
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kegiatan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh P2TP2A	87%	100%	114,94%	Sangat Mendukung	Anak yang mengalami tindak kekerasan dan berhadapan dengan huum sudah terfasilitasi semua
1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan anak	1 dokumen	1 dokumen	100%	Sangat Mendukung	

2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak anak	1 dokumen	1 dokumen	100%	Sangat Mendukung	
Program Pengendalian Penduduk	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro	100%	100%	100%	Sangat Mendukung	
1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jenis implementasi sinkronsasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	2 jenis	3 jenis	150%	Sangat Mendukung	
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi Program KKBPK	1 dokumen	1 dokumen	100%	Sangat Mendukung	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Unmet need	10,20	7,9	122,55%	Sangat Mendukung	

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jenis kegiatan advokasi dan KIE yang mendukung program KKBPK	5 jenis	5 jenis	100%	Sangat Mendukung	
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh KB yang mendapatkan pembinaan	90%	100%	111,11%	Sangat Mendukung	
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan dan pendistribusian alkon	4 jenis	4 jenis	100%	Sangat Mendukung	
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kampung KB yang di bina	82 kampung KB	344 kampung KB	419,51%	Sangat Mendukung	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	BKB 32,98%, BKR 28,26%, BKL 36,32%	BKB 35,87%, BKR 30,15%, BKL 37,09%	105,85%	Sangat Mendukung	

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok sasaran pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	6 sasaran	6 sasaran	100%	Sangat Mendukung	
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pembina dan kelompok PIK yang dibina	90 kelompok	90 kelompok	100%	Sangat Mendukung	

Dari data diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat 7 (tujuh) Program/Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Sangat Mendukung;
2. Terdapat 1 (satu) Program/Kegiatan yang masuk dalam Kategori Mendukung

Data diatas, akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya untuk mengetahui Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang sangat menunjang, menunjang, cukup menunjang, dan kurang menunjang untuk dioptimalkan.

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1 Pelaksanaan Kinerja Organisasi

Pelaksanaan Kinerja Organisasi disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dilaksanakan dengan narasi-narasi atas apa yang dilaksanakan selama satu tahun ini. Berikut adalah upaya-upaya pelaksanaan kinerja organisasi seperti berikut;

1. Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut tahun sebelumnya

Tabel 3.2.1.a Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut tahun sebelumnya;

Rencana Tindak Lanjut Tahun sebelumnya	Upaya yang telah dilaksanakan
Mengoptimalkan kinerja kader PPKBD dan Sub PPKBD melalui sistem-sistem yang dibentuk di lapangan	Kader PPKBD dan Sub PPKBD mempunyai data base berjenjang mulai dari desa sebagai dasar kegiatan menurunkan untuk menurunkan kemiskinan, stunting dan bangga kencana
Sosialisasi dan pendampingan pencatatan melalui aplikasi dengan memberikan fokus pada kecamatan yang masih kurang capaiannya	Keterlibatan kader dalam pengisiian Inkelud dan new siga sebagai bahan pencatatan
Sosialisasi Kabupaten Layak Anak dan PUG	Menurunkan kekerasan dalam keluarga dan perkawinan anak dimulai dari desa dengan Geprak

2. Pelaksanaan Kinerja Organisasi
    a. Meningkatnya upaya pengendalian penduduk

       Realisasi kinerja meningkatnya upaya pengendalian penduduk dapat diketahui dari indikator Crude Birth Rate (CBR) tahun 2024 telah terealisasi sebesar 9,50 atau sebesar 113,71 dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini sangat berhasil karena dengan menurunnya angka kelahiran (CBR) akan dapat mengurangi laju pertambahan penduduk.

    b. Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan

       Sasaran meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan telah tercapai dengan indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender) terealiasasi 93,25 atau capaian realiasasi dari target sebesar 99,93 %. Capaian ini sangat berhasil karena semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki

3.2.2 Analisis Keterlibatan Pihak Lain

Pihak yang terlibat dalam menunjang pencapaian kinerja dapat dipetakan sebagai berikut;

1. Pihak Internal Pemerintah Kabupaten Kediri
    a. Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan safari KB
    b. Polres Kediri dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum
    c. Dinas Pendidikan dalam advokasi pencegahan perkawinan anak
    d. Bappeda bekerja sama dalam perencanaan program Bangga Kencana
2. Pihak Instansi Vertikal
    a. BKKBN Pusat dalam penyediaan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan
    b. Kemenag dalam memberikan advokasi kepada masyarakat pencegahan perkawinan anak
    c. Kejaksaan Negeri dalam penanganan kasus anak dan perempuan
    d. Polres Kediri dalam pendampingan anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum
3. *Stakeholder,* Pihak Swasta dan Masyarakat
    a. PKK dalam advokasi tentang program Bangga Kencana.
    b. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dalam pelayanan KB
    c. IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dalam pelayanan KB

3.2.3 Analisis Faktor Pendukung

Berikut adalah beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja;

1. Sasaran Upaya pengendalian penduduk
    a. Adanya peran kader PPKBD dan Sub PPKBD serta PKB / PLKB di kecamatan
    b. Adanya anggaran yang mendukung semua kegiatan
    c. Antusias yang tinggi dari masyarakat untuk menggunakan KB MKJP
2. Sasaran Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan
    a. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
    b. Dukungan anggaran dengan kolaborasi antar OPD
    c. Adanya kesadaran dari masyarakat untuk hidup lebih baik

3.2.4 Analisis Faktor Penghambat

Berikut adalah beberapa hal yang menghambat pencapaian kinerja;

1. Sasaran Upaya pengendalian penduduk
    a. Pemahaman masyarakat terdap program Bangga Kencana masih kurang
    b. Tingginya kasus perkawinan pada anak
2. Sasaran Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan
    a. Belum optimalnya peran kader perempuan di desa untuk mendukung program dari bawah
    b. SDM pengampu masih kurang

3.2.5 Rencana Tindak Lanjut

Berikut adalah beberapa hal yang akan ditindaklanjuti dalam kinerja;

1. Sasaran Upaya pengendalian penduduk
    a. Penyebarluasan program Bangga Kencana
    b. Sosialisasi pencegahan perkawinan pada anak
2. Sasaran Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan
    a. Road map penyebaran peran kader perempuan
    b. Optimalisasi peran penyuluh KB dan kader

3.2.6 Penghargaan dan Apresiasi Kinerja

Berikut adalah beberapa penghargaan dan apresiasi kinerja yang didapatkan pada tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya;

NO	Nama Penghargaan	Tahun Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala (Internasional/ Nasional/ Provinsi)	Penerima	Keterangan	Dokumentasi Penerimaan
1.	Penghargaan Manggala Karya Kencana Tingkat Nasional	2024	BKKBN Pusat	Nasional	Bupati Kediri		 
2.	Juara 2 Live Tik Tok Bidan KBPP Asik	2024	BKKBN Provinsi Jawa Timur	Provinsi	DP2KBP3A / Bidan Ny. Istianah	Mendapatkan Juara 2	

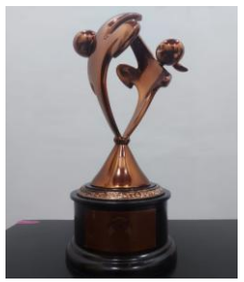
3.	Juara 3 Live Tik Tok Bidan KBPP Asik	2024	BKKBN Provinsi Jawa Timur	Provinsi	DP2KBP3A / Bidan Ny. Sri Hartini	Mendapatkan Juara 3	
4.	Juara 3 Pelayanan KB Terbaik kategori Klinik Swasta Tingkat Nasional	2024	BKKBN Pusat	Nasional	DP2KBP3A / Klinik Vita Medika	Mendapatkan Juara 3	

5.	Finalis Terpilih Poster Competition Audit Kasus Stunting Indonesia 2024	2024	BKKBN Pusat	Nasional	Kabupaten Kediri	Finalis Terpilih	
6.	Terbaik II PIK-R Percontohan Segmentasi Usia 15-19 Tahun Terbaik Tingkat Provinsi	2024	Provinsi Jawa Timur	Provinsi	PIK-R A'Forling SMAN 1 Grogol	Terbaik II	

7.	Juara 2 Pelayanan KB Terbaik kategori Klinik Swasta Tingkat Provinsi	2023	BKKBN Provinsi Jawa Timur	Provinsi	DP2KBP3A / Klinik Kusuma Pertiwi	Mendapatkan Juara 2	
8.	KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak)	2023	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindangan Anak (PPPA) Republik Indonesia	Nasional	DP2KBP3A/ Bidang PPPA	Mendapatkan Predikat Madya	 

9.	APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	2023	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindangan Anak (PPPA) Republik Indonesia	Nasional	DP2KBP3A/ Bidang PPPA	Mendapatkan Predikat Pratama	
10.	Juara 1 Lomba Duta Genre Tk Jawa Timur	2023	BKKBN Provinsi Jawa Timur	Provinsi	DP2KBP3A/ Bidang KS	Mendapatkan Juara 1	 

11.	Juara 2 Lomba APE BKB Tk Jawa Timur	2023	BKKBN Provinsi Jawa Timur	Provinsi	DP2KBP3A/ Bidang KS	Mendapatkan Juara 2	
12.	Pencapaian Pelayanan KB 120,51 % dalam rangka *World Contraception Day*	2023	BKKBN Provinsi Jawa Timur	Provinsi	DP2KBP3A/ Bidang KB		

13.	Kategori Faskes dengan Layanan MKJP terbanyak pada Pelayanan KB Serentak Hari Ibu	2023	BKKBN Provinsi Jawa Timur	Provinsi	DP2KBP3A/ Puskesmas Semen		
14.	KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak)	2022	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindangan Anak (PPPA) Republik Indonesia	Nasional	DP2KBP3A/ Bidang PPPA	Mendapatkan Predikat Pratama	 

15.	APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	2021	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindangan Anak (PPPA) Republik Indonesia	Nasional	DP2KBP3A/ Bidang PPPA	Mendapatkan Predikat Pratama	
16.	Juara 1 Lomba Ajang Kreativitas di Komunitas Remaja “Ajang Kespro Kawula Muda (AkuKaMu) “ Tngkat Kabupaten/Kota se-Jatim	2021	BKKBN Provinsi Jawa Timur	Provinsi	DP2KBP3A / PIK R Jawara SMAN 1 Wates Kediri	Juara 1	

17.	Piagam Penghargaan atas Kontribusi dalam Peningkatan Kesertaan KB pada Kegiatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi bersama Mitra Kerja pada Hari Kontrasepsi Sedunia	2021	BKKBN Pusat	Nasional	DP2KBP3A Kabupaten Kediri		
18.	Rumah Sakit Unggulan Pelayanan KB Jawa Timur	2021	BKKBN Pusat	Nasional	DP2KBP3A / RS Aura Syifa		

3.3 Realisasi Kinerja Anggaran

Realisasi Kinerja Anggaran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut;

Tabel 3.3.a Tabel Realisasi Kinerja Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Anggaran		
			Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
I	**Meningkatnya Upaya Pengendalian Penduduk**		**Crude Brith Rate (CBR)**	**26.340.741.400**	**25.509.622.514**	**96,84**
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga**	**1.675.897.450**	**1.621.986.664**	**96,78**
		1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jenis implementasi sinkronsasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	67.266.950	**57.736.704**	85,83
		a. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah dokumen hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	5.684.000	4.477.000	78,76
		b. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	9.966.000	8.740.600	87,70
		c. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah dokumen Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	51.616.950	44.519.104	86,25
		2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen evaluasi Program KKBPK**	1.608.630.500	**1.564.249.960**	97,24
		a. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1.945.000	1.245.600	64,04
		b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	18.425.000	17.355.700	94,20
		c. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	1.365.180.000	1.349.285.200	98,84
		d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	111.878.500	94.758.960	84,70
		e. Pembinaan dan Pengawasan Pencatat an dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	111.202.000	101.604.500	91,37
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Unmet need**	**15.158.129.950**	**14.449.629.318**	95,33
		1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jenis kegiatan advokasi dan KIE yang mendukung program KKBPK**	**2.321.262.075**	**2.264.393.560**	97,55

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Anggaran		
			Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
		a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	222.937.500	210.660.962	94,49
		b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluraga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	38.447.575	31.525.400	82,00
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional Pro gram Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui rapat koordinasi Kecamatam (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Loka Karya (Minilok)	390.000.000	387.150.000	99,27
		c. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluraga Berencana)	5.000.000	4.977.000	99,54
		d. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluraga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	231.758.000	222.842.000	96,15
		e. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluraga Berencana)	1.433.120.000	1.407.238.198	98,19
		2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Persentase tenaga penyuluh KB yang mendapatkan pembinaan**	6.243.305.500	**6.214.130.900**	99,53
		a. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	141.905.500	112.880.900	79,55
		b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	6.101.400.000	6.101.250.000	100
		3 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Jenis pelayanan dan pendistribusian alkon**	5.097.811.375	**4.531.620.258**	88,89

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Anggaran		
			Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
		a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59.600.000	10.420.000	17,48
		b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang g mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4.826.076.375	4.315.575.974	89,42
		c. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	105.000000	100.759.820	95,96
		d. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	135.000	0	0
		e. Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jejaring dan jaringannya	Jumlah laporan Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jejaring dan jaringannya	107.000.000	104.864.464	98,00
		4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Jumlah kampung KB yang di bina**	1.495.750.000	**1.439.484.600**	96,24
		a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluraga Berencana) di Kampung KB	1.495.750.000	1.439.484.600	96,24
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)**	**9.506.714.000**	**9.438.006.532**	**99,28**
		1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Jumlah kelompok sasaran pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	964.618.900	**911.367.232**	94,48
		a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	309.540.000	304.540.100	98,38
		b. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15.755.800	11.201.400	71,09

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Anggaran		
			Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
		c. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7.164.100	4.674.100	65,24
		d. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	250.000.000	225.625.000	90,25
		e. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.474.300	4.728.272	73,03
		f. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	375.684.700	360.598.360	95,98
			Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun			
		1 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Jumlah pembina dan kelompok PIK yang dibina**	8.542.095.100	**8.526.639.300**	99,82
		a. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan ProgramKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	293.100.000	282.842.100	96,50
		b. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.195.100	3.600.000	69,30
		c. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/Kelahiran, Baduta?balita)	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/Kelahiran, Baduta/Balta)	3.780.000.000	3.780.000.000	100

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Anggaran		
			Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
		d. Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin?kelahiran, Baduta/Baduta)	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/Kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	4.463.800.000	4.460.197.100	99,92
II	**Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan**		**IPG (Indeks Pembangunan Gender)**	**886.999.600**	**533.947.224**	**60,19**
		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase OPD yang responsif gender**	**29.508.000**	**28.460.323**	96,45
		1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah OPD yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan**	29.000.200	**27.952.723**	96,39
		a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PUG kewenangan kabupaten	4.000.200	3.915.000	97,87
		b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk perencanaan pembangunan resposif gender (PPRG) kewenangan kabupaten	25.000.000	24.037.723	96,15
		2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah kelompok yang mendapat sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan**	507.800	**507.600**	99,96
		a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten	507.800	**507.600**	99,96
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A**	**8.500.000**	**6.358.993**	**74,81**
		1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perem puan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen kebijakan perlindungan perempuan**	**500.000**	**452.000**	**90,40**
		a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelak sanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten	500.000	452.000	90,40
		2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan**	**8.000.000**	**5.906.993**	**73,84**
		a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan dan korban kekerasan kewenangan kabupaten	8.000.000	5.906.993	73,84

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Anggaran		
			Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Peresentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa**	**471.492.000**	**200.299.000**	42,43
		1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan event	471.000.000	**199.847.800**	42,43
		a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten yang tersedia	471.000.000	**199.847.800**	42,43
		2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen rekomendasi jejaring layanan perlindungan perempuan**	**492.000**	**451.200**	**91,71**
		a. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten	492.000	451.200	91,71
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh P2TP2A	115.999.600	112.027.908	96,58
		1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumenPelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	115.999.600	112.027.908	96,58
		a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	115.999.600	112.027.908	96,58
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A**	**261.500.000**	**186.801.000**	71,43
		1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen kebijakan perlindungan anak**	**126.500.000**	**123.620.000**	**97,72**
		a. Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	126.500.000	123.620.000	97,72
		2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak anak**	**135.000.000**	**63.181.000**	**46,80**

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Anggaran		
			Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
		a. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (Anak Memerlukan Perlindungan Khusus)	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten	135.000.000	63.181.000	46,80
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**5.852.350.735**	**5.507.217.480**	**94,10**
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jenis dokumen perangkat daerah yang diselesaikan**	600.000	**395.700**	65,95
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000	75.000	50,00
		b. Koordinasi dan Penyusunan Domunen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Domunen RKA SKPD	150.000	25.000	16,67
		c. Koordinasi dan Penyusunan Domunen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Domunen Perubahan RKA SKPD	150.000	149.800	99,87
		d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	150.000	145.900	97,27
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	4.628.920.280	**4.329.425.142**	93,53
		a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3.638.377.980	3.340.599.534	91,82
		b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	759.000.000	757.631.008	99,85
		c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	214.920.000	214.590.000	99,85
		d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.139.700	8.122.600	99,79
		e Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	8.482.600	8.482.000	99,99
		3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	0	**0**	0
		a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	**0**	0
		4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian**	316.145.000	**306.994.200**	97,11

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Anggaran		
			Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
		a. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	150.000	0	0
		b. Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	30.545.000	27.794.200	90,99
		c. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	150.000	150.000	100
		d. Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	285.300.00	279.050.000	97,81
		5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	191.615.425	**173.706.479**	90,65
		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6.824.700	6.819.000	99,92
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5.000.000	4.904.374	98,09
		b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9.650.000	9.591.600	99,39
		c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3.360.000	3.360.000	100
		d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.630.725	149.031.505	89,44
		e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150.000	0	0
		6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	524.605.000	**520.047.610**	99,13
		a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	524.605.000	520.047.610	99,13
		7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	54.089.380	**45.063.543**	83,31
		a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000	150.000	100
		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36.600.000	27.603.643	75,42
		c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan pelayanan umum kantor yang disediakan	17.339.380	17.309.900	99,83

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Anggaran		
			Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
		8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara**	136.375.650	**131.584.806**	96,49
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	61.000.000	58.797.624	96,39
		b. Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	393.900	0	0
		c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14.150.800	14.150.500	100
		d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	60.830.950	58.636.682	96,39
Total Anggaran				**33.080.091.735**	**31.550.787.218**	**95,38**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri selama tahun 2024, sesuai dengan rencana kinerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD, mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **33.080.091.735**,-. Dari alokasi tersebut 95,38% atau Rp. **31.550.787.218**,- terserap.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri berkaitan dengan penyelenggaraan kinerja tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategi 2021 - 2026 sudah tercapai.

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan selama tahun 2024 telah tercapai dengan skala pengukuran *sangat berhasil* dengan capaian yang meliputi :

a. Meningkatnya Upaya Pengendalian Penduduk dengan indikator Crude Birth Rate (CBR) sebesar 113,71%
b. Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan dengan indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender) tercapai sebesar 99,93%

Kendala yang menjadi perhatian DP2KBP3A Kabupaten Kediri antara lain :

1. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
2. Perubahan sistem pencatatan dari BKKBN yang sering terkendala sistem aplikasi menyebabkan data tidak bisa dianalisa real time. Hal ini berdampak pada performa kinerja program Bangga Kencana
3. Kurangnya keterlibatan aktif, advokasi dan koordinasi terhadap kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (PUG)

Langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kinerjanya adalah :

1. Mengoptimalkan kinerja PKB dan kader melalui sistem-sistem yang dibentuk di lapangan
2. Sosialisasi dan pendampingan pencatatan melalui aplikasi dengan memberikan fokus pada kecamatan yang masih kurang capaiannya
3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mulai dari desa.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri yang dapat disajikan sebagai petanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Kediri, Januari 2025

Kepala DP2KBP3A
Kabupaten Kediri

Dr. dr. NURWULAN ANDADARI MMRS.
Pembina Tk. I
NIP. 19681029 200312 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. dr. Nurwulan Andadari M.MRS.
Jabatan : Kepala DP2KBP3A

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hanindhito Himawan Pramana
Jabatan : Bupati Kediri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 6 September 2024

Ditandatangi secara elektronik oleh: Pihak Kedua, Bupati Kediri	Ditandatangi secara elektronik oleh: Pihak Pertama, Kepala DP2KBP3A
Hanindhito Himawan Pramana	Dr. dr. Nurwulan Andadari, M.MRS Pembina Tingkat I NIP 196810292003122002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk	Crude Birth Rate (CBR)	11,01%
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,31

No	Program	Anggaran	
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.213.972.755
2.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	29.508.000
3.	Perlindungan Perempuan	Rp.	8.500.000
4.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	145.492.000
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	115.999.600
6.	Perlindungan Khusus Anak	Rp.	261.500.000
7.	Pengendalian Penduduk	Rp.	1.675.897.450
8.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	15.158.129.950
9.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	9.200.914.000
	Jumlah Anggaran	Rp.	**28.809.913.755**

Kediri, 6 September 2024

Ditandatangi secara elektronik oleh:
Pihak Kedua,
Bupati Kediri

Hanindhito Himawan Pramana

Ditandatangi secara elektronik oleh:
Pihak Pertama,
Kepala DP2KBP3A

Dr. dr. Nurwulan Andadari, M.MRS
Pembina Tingkat I
NIP 196810292003122002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN